

# PENILAIAN KINERJA PUBLIK BERDASARKAN PELAYANAN DAN VALUE FOR MONEY (Studi Kasus Pada Puskesmas Trosobo Taman)

Nur Wahyuni Anggraini  
*nurwahyuni.anggraini@gmail.com*  
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

## ABSTRACT

*This research aimed to examine the public performance of Puskesmas Trosobo. The assessment was based on the rule of Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform number 17, 2017 and Value for Money. The Research was descriptive-qualitative. While, the instruments used desk evaluation, field observation, questionnaire and interview. For the performance assessment, based on Value for Money, it examined the economics level, its efficiency and effectivity. The research result concluded the performance assessment, which based on the rule of Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform number 17, 2017 in Puskesmas Trosobo; was considered average (with notes) of 2,27. Moreover, from its performance assessment, which based on Value for Money, the performance of Trosobo Puskesmas was considered economical as its achievement was 80% of all its program. Furthermore, from its efficiency assessment, the performance of Puskesmas Trosobo was categorized as very efficient as its achievement was less than 60%. In addition, from its effectivity assessment, the performance of Puskesmas Trosobo was categorized as effective with its achievement of 92, 20%.*

*Keywords: public performance, rule of ministry of administrative and bureaucratic reform, value for money.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian kinerja publik di Puskesmas Trosobo. Penilaian kinerja publik tersebut dilakukan berdasarkan PERMENPAN No.17 Tahun 2017 dan *Value For Money*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berdasarkan PERMENPAN dalam penelitian ini dilakukan dengan *desk evaluation*, observasi lapangan, kuisisioner, dan wawancara. Sedangkan, penilaian kinerja berdasarkan *Value For Money* dilakukan dengan cara mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja berdasarkan PERMENPAN No. 17 Tahun 2017 di Puskesmas Trosobo yaitu cukup (dengan catatan) dengan nilai 2,49. Sedangkan hasil penilaian kinerja berdasarkan *Value For Money*, kinerja Puskesmas Trosobo dikatakan ekonomis karena memperoleh nilai capaian lebih dari 80% pada semua program kerjanya. Pada aspek efisiensi ketiga program Puskesmas Trosobo masuk dalam kategori sangat efisien karena ketiga program tersebut memperoleh nilai capaian kurang dari 60%. Pada aspek terakhir yaitu efektivitas kinerja Puskesmas Trosobo masuk dalam kategori efektif dengan tingkat capaian 92,20%.

Kata Kunci: kinerja publik, peraturan menteri pemberdayagunaan aparatur negara, *value for money*.

## PENDAHULUAN

Penilaian kinerja memiliki pengaruh yang sangat penting bagi suatu perusahaan dan entitas. Penilaian kinerja memberikan kesempatan bagi pemerintah dan karyawan untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan guna meningkatkan kinerja mereka. Selain itu penilaian kinerja dapat digunakan bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dan pengambilan keputusan. Serta dapat digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi memiliki dasar hukum maka Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan PERMENPAN No. 17 Tahun 2017 sebagai pedoman penilaian kinerja pelayanan publik. Dalam PERMENPAN No.17 Tahun 2017 ruang lingkup pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara publik ini meliputi 6

(enam) aspek, yaitu: (1) Kebijakan Pelayanan (2) Profesionalisme SDM (3) Sarana Prasarana (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (5) Konsultasi dan Pengaduan (6) Inovasi Pelayanan.

Sektor publik merupakan bentuk pelayanan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat. Jenis pelayanan sektor publik ada 3 yaitu: Pelayanan Administrasi, Pelayanan Jasa, dan Pelayanan Barang. Salah satu bentuk pelayanan jasa yang disediakan pemerintah dalam bidang kesehatan adalah adanya Puskesmas di setiap desa.

Puskesmas adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Keberadaan puskesmas diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat. Selain itu masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Puskesmas membutuhkan sistem pengukuran kinerja untuk menilai kinerja setiap unit pelayanan dari Puskesmas. Salah satu cara mengukur kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu dengan menggunakan PERMENPAN No. 17 Tahun 2017 tentang "Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik". Dengan adanya penilaian kinerja pada puskesmas pada setiap periode dapat dijadikan acuan bagi pihak puskesmas untuk menentukan visi dan misi mereka pada tahun berikutnya sehingga pihak puskesmas dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu untuk menilai kinerja pelayanan publik dapat juga menggunakan konsep *value for money*. Konsep *value for money* adalah merupakan konsep penilaian kinerja yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* dapat digunakan sebagai tolak ukur antara penerimaan dan pembelanjaan suatu Negara dan juga bisa digunakan untuk suatu perusahaan atau entitas yang sedang mencari laba.

*Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain: (1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran (2) Meningkatkan mutu pelayanan publik (3) Menurunkan biaya pelayanan publik (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik (5) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap uang publik.

Berdasarkan hasil penelitian Eka (2018) dapat disimpulkan bahwa kinerja layanan jasa kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Sidosermo Surabaya kepada masyarakat pengguna layanan tersebut telah melebihi dari harapan mereka sehingga mereka merasa puas dengan pelayanan yang diterima. Kesimpulan ini berdasarkan jumlah atribut pada kuadran B dan kuadran D yang lebih banyak dari jumlah atribut yang berada pada kuadran A dan kuadran C. Faktor-faktor yang menempati pada kuadran A yang perlu diprioritaskan ada 3 (tiga) faktor antara lain: fasilitas dan keadaan fisik, kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi, dan kemampuan pegawai dalam memahami kebutuhan penggunaan jasa layanan. Faktor-faktor yang menempati pada kuadran B yang perlu dipertahankan ada 7 (tujuh) faktor antara lain: pengaturan loket layanan, penampilan pegawai, ketepatan waktu pelayanan, tanggap atas kebutuhan pengguna pelayanan, kesediaan pegawai dalam membantu pengguna layanan, kerjasama antar pegawai, keramahan dan kesopanan pegawai. Faktor-faktor yang menempati pada kuadran C yang dianggap kurang penting bagi masyarakat ada 3 (tiga) faktor antara lain: kemutakhiran peralatan yang digunakan, pelayanan yang mudah dan tidak berbelit dan penerapan jam kerja kantor. Faktor-faktor yang menempati pada kuadran D yang dianggap kurang penting oleh masyarakat tetapi dilakukan dengan berlebihan oleh pihak Puskesmas ada 4 (empat)

faktor, antara lain: kemampuan pegawai dalam mengambil keputusan dan tindakan, kesabaran dalam menghadapi keluhan, kesungguhan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan perhatian terhadap kepentingan setiap pengguna layanan.

Sedangkan berdasarkan penelitian Suwandi (2016) tentang pengukuran kinerja dalam perspektif *Value for Money* dapat disimpulkan pada tahun 2014 dan 2015 dari segi ekonomis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja dapat dikatakan ekonomis atau hemat. Hal ini berdasarkan pada Badan Arsip dan Perpustakaan menjalankan semua programnya menggunakan dana seminimal mungkin tanpa harus mengorbankan program tersebut. Ditinjau dari segi efisiensi kinerja pada tahun 2014 dan 2015 relatif efisien, karena empat program yang dijalankan menghasilkan sepuluh kegiatan dengan membiayai program kerjanya dengan dana yang serendah-rendahnya. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai *output* yang dihasilkan dari program kerja Badan Arsip dan Perpustakaan kota Surabaya. Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari segi efektivitasnya pada tahun 2014 dan 2015 bahwa tingkat pencapaian kinerja dapat dikatakan efektif apabila program kerja berhasil melakukan kegiatan dan tujuannya. Pada tahun 2014 dan 2015 program kerja yang sudah dilakukan memberikan dampak meningkatnya minat budaya membaca masyarakat, serta SKPD telah melakukan tertib administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas saya ingin melakukan penelitian tentang “ Penilaian Kinerja Publik Berdasarkan Pelayanan dan *Value for Money*”. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kinerja pelayanan pada Puskesmas Trosobo berdasarkan Permenpan? (2) Bagaimana kinerja Puskesmas Trosobo berdasarkan *Value for Money*? Dan tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kinerja pelayanan pada Puskesmas Trosobo berdasarkan Permenpan (2) Untuk mengetahui kinerja Puskesmas Trosobo berdasarkan *Value for Money*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah proses penilaian atas pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam suatu entitas sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Penilaian kinerja bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari suatu entitas. Dan agar dapat tercapainya tujuan-tujuan organisasi yang sudah direncanakan. Penilaian kinerja juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga dibutuhkan pula peraturan tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam penilaian kinerja unit pelayanan publik. Pedoman penilaian kinerja ini dapat digunakan dalam lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

### Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas pemerintah maupun swasta dalam memberikan barang dan jasa kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jenis pelayanan publik dibagi menjadi tiga yaitu: Pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pelayanan administrasi adalah pelayanan pemerintah yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat, contoh: KTP, Akte, SIM. Pelayanan barang adalah pelayanan pemerintah yang mengasihkan berbagai bentuk jenis barang, contoh: jaringan telpon, air bersih, penyediaan tenaga listrik. Dan pelayanan jasa adalah pelayanan pemerintah dalam bentuk jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi.

### **Kebijakan Pelayanan**

Kebijakan pelayanan adalah visi, misi, dan komitmen suatu organisasi dalam bentuk peraturan untuk mencapai kualitas tertentu sesuai tujuannya. Dalam kebijakan pelayanan terdapat beberapa indikator diantaranya adalah standart pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. Dari indikator tersebut suatu organisasi dapat menentukan dan menilai sendiri apakah kebijakan pelayanan yang sudah ada dapat membantu organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Jika tidak maka organisasi tersebut bisa membuat perencanaan untuk menentukan kebijakan yang baru agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam aspek kebijakan pelayanan publik ini telah terdapat prinsip keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdayaguna, dan aksesibilitas.

### **Profesionalisme SDM**

Profesionalisme sumber daya manusia adalah standart kualifikasi, kualitas, dan kinerja sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan. Kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan dari organisasi tersebut. Karena sumber daya manusia memiliki peran dalam semua kegiatan organisasi yang berlangsung, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan proses evaluasi. Sehingga profesionalisme sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangatlah penting. Untuk ini ada beberapa indikator untuk menilai profesionalisme dari sumber daya manusia diantaranya adalah kompetensi, responsifitas, kode etik, penghargaan dan sanksi, dan budaya pelayanan. Indikator tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan profesionalitas dari sumber daya manusia pada suatu organisasi. Dalam aspek Profesionalisme sumber daya manusia termasuk dalam salah satu prinsip pelayanan publik yaitu berdayaguna.

### **Sarana Prasarana**

Sarana prasarana adalah fasilitas, tempat, dan peralatan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik untuk mendukung proses pemberian pelayanan publik. Macam-macam jenis sarana prasarana yang seringkali disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya adalah tempat parkir dan ruang tunggu, sarana prasarana bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, sarana prasarana penunjang seperti ruang bermain anak dan kantin, sarana *front office* seperti ruang konsultasi dan informasi. Sarana prasarana yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik guna untuk menunjang pemberian pelayanan juga merupakan salah satu prinsip berdayaguna yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **Sistem Informasi Pelayanan Publik**

Sistem informasi pelayanan publik digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat baik secara manual maupun elektronik. Sistem informasi pelayanan publik ada dua jenis yaitu: sistem informasi elektronik dan sistem informasi non elektronik. Sistem informasi elektronik adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada masyarakat melalui situs atau web dari penyelenggara pelayanan publik yang sudah disediakan. Sedangkan sistem informasi non elektronik adalah suatu sistem penyediaan informasi non elektronik bagi masyarakat pengguna pelayanan publik seperti brosur, pamflet. Dengan adanya sistem informasi pelayanan publik yang sudah disediakan oleh penyelenggara diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Sistem informasi pelayanan publik termasuk dalam dalam salah satu prinsip pelayanan publik yaitu prinsip keadilan.

### Konsultasi dan Pengaduan

Konsultasi adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara untuk menyelesaikan permasalahan tertentu pada saat sebelum dan pada saat pelayanan diberikan. Sedangkan pengaduan adalah penyampaian keluhan masyarakat kepada penyelenggara pemberi pelayanan publik.

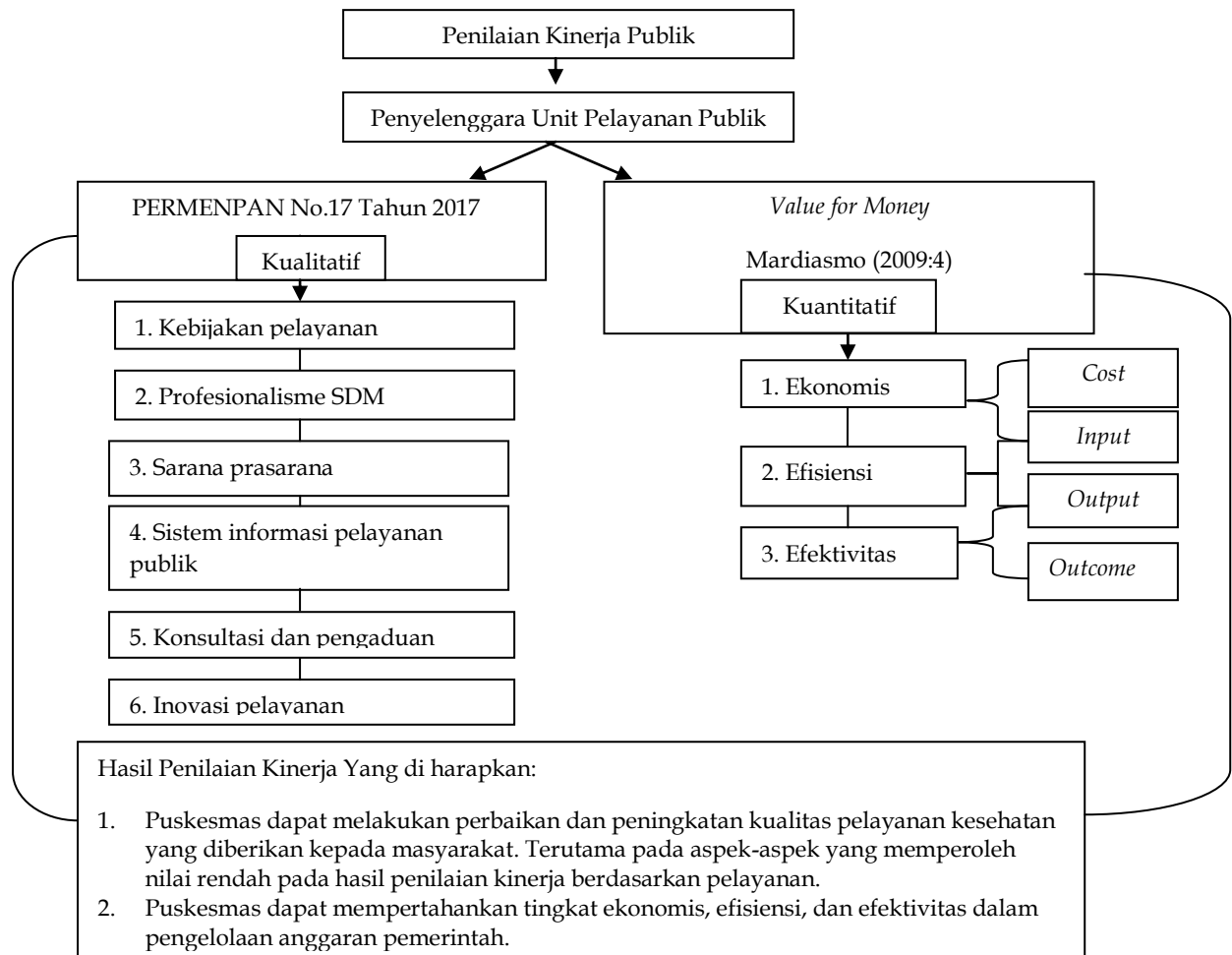
### Inovasi Pelayanan

Inovasi pelayanan merupakan kreatifitas dan modifikasi pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung. Inovasi yang diterapkan oleh pemberi jasa pelayanan publik pasti akan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan ini termasuk dalam prinsip berdayaguna.

### Value for Money

Value for money adalah salah satu alat pengukuran kinerja untuk menilai suatu kinerja pada perusahaan publik dan juga digunakan untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas segala kegiatan pada organisasi sektor publik tersebut. Value for money dapat dijadikan tolak ukur dalam anggaran belanja suatu negara, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik).

### Rerangka Pemikiran



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Objek Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian dengan sebenarnya tanpa dilebih-lebihkan. Obyek penelitian dalam penelitian pada proposal ini adalah salah satu organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan berupa jasa. Organisasi tersebut bergerak dibidang kesehatan yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dimana mereka memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan dan menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan.

Dengan adanya puskesmas pada setiap desa maupun kecamatan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada masyarakat disekitar lingkungan puskesmas. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas maka tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi, karena masyarakat merasa puas dan senang atas pelayanan yang sudah diberikan oleh puskesmas tersebut. Sehingga membuat masyarakat tersebut untuk mau menggunakan jasa pelayanan dari puskesmas tersebut lagi. Akan tetapi jika masyarakat merasa tidak puas dan kecewa atas pelayanan yang sudah diberikan oleh pihak puskesmas maka masyarakat tidak akan mau lagi kembali untuk menggunakan jasa pelayanan pada puskesmas tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan: (1) Desk evaluation (2) Observasi lapangan (3) Kuisisioner (4) Wawancara.

Pengisian kuisisioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuisisioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akuntabel. Hasil pengolahan data kuisisioner penilaian merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Instrumen yang digunakan berjumlah tiga jenis yaitu: (1)Formulir F-01 diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang menjadi fokus penilaian, untuk memperoleh data perspektif (2)Formulir F-02 diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dengan menggunakan seluruh metodologi yang diperlukan, untuk memperoleh data objektif (3)Formulir F-03 diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.

### **Satuan Kajian**

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti *IMF* dan *World Bank* yang menuntut untuk mengubah pemerintahan dan proses pelayanan. Adanya tuntutan untuk melakukan perbaikan pelayanan menjadi alasan utama bagi lembaga tersebut untuk memberikan bantuan dana. Tetapi proses perbaikan tersebut mengalami beberapa kendala diantaranya pada masa orde baru dan periode reformasi terjadi dominasi negara pada berbagai elemen-elemen kehidupan. Hingga paradigma reformasi pelayanan muncul dan mengkaji ulang peran pemerintah.

Walaupun era reformasi di Indonesia sudah berjalan lebih dari 10 tahun permasalahan mengenai pelayanan publik masih sangat banyak diantaranya yaitu adanya hambatan birokratis yang menyebabkan proses pelayanan memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah juga mempengaruhi dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Prosedur pemberian pelayanan yang ada saat ini juga terlalu rumit bagi masyarakat sehingga masyarakat seringkali merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

### Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan nilai untuk setiap indikator

Setiap pertanyaan kuisioner memiliki bobot yang berbeda-beda disesuaikan dengan bobot per aspek. Karena nilai indeks adalah nilai komposit dari 3 formulir, maka nilai indikator adalah nilai rata-rata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator.

$$\text{Nilai per indikator: } \left( \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}$$

2. Menentukan nilai setiap aspek

Nilai setiap aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai perindikator dalam satu aspek.

$$\text{Nilai per aspek: } \sum \text{nilai perindikator}$$

3. Menentukan Indeks

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks: } \sum (\text{nilai aspek } n \times \text{bobot aspek } n)$$

### Perhitungan Value for Money Ekonomi

Pengukuran ekonomi berkaitan dengan perolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan program sejenis dengan organisasi lain dan biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah disetujui. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan biaya yang dikeluarkan (*input*) dengan anggaran yang telah disetujui.

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Biaya input}} \times 100\%$$

### Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar rasio maka semakin tinggi tingkat efisiensinya.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

### Efektivitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Efektifitas tidak menjelaskan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2009).

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu analisis penilaian kualitatif dan kuantitatif. Analisis penilaian kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan pelayanan (PERMENPAN No. 17 tahun 2017) yang dinilai berdasarkan perspektif (kepala puskesmas), objektif (peneliti), dan persepsi (pengguna pelayanan) yang diperoleh dalam penelitian tersebut. Sedangkan analisis penilaian kuantitatif dalam

penelitian ini menggunakan konsep *Value for Money* yang terdiri dari aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data penelitian pada Puskesmas Trosobo seperti gambaran umum, visi dan misi organisasi, serta kegiatan operasional manajerial dan program kerja maupun target yang hendak dicapai (2) Menganalisis data-data yang telah diperoleh berdasarkan pelayanan (PERMENPAN No. 17 tahun 2017) dan berdasarkan konsep *value for money*. Analisis data berdasarkan pelayanan (PERMENPAN No.17 tahun 2017) dilakukan dengan cara mengitung nilai setiap form kemudian penentuan nilai untuk setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek dan menentukan nilai indeks. Setelah nilai indeks diketahui, pada tabel 1 terdapat range nilai untuk menilai kinerja Puskesmas Trosobo berdasarkan pelayanan (PERMENPAN No. 17 tahun 2017). Sedangkan analisis data dengan menggunakan konsep *value for money* yaitu dengan melakukan penilaian kinerja berdasarkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Dalam tabel 2, 3, dan 4 terdapat rasio untuk menilai setiap aspek berdasarkan konsep *value for money* (3) Mendiskripsikan data penelitian yang terkait dengan materi kajian penelitian (4) Analisis dan pembahasan evaluasi pelaporan kinerja dan penilaian kinerja instansi pemerintah deskripsi data dan berlandaskan teori yang relevan (5) Memberikan simpulan dan saran berdasarkan hasil dan analisis pembahasan.

**Tabel 1**  
**Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**

Range Nilai	Kategori	Makna
0- 1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan catatan)
2,51-3,00	C-	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan catatan)
3,51-4,00	B-	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber: PP No.17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja

### **Kriteria Value for Money** **Ekonomi**

Menurut Mahsun (2006:179) rasio ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut membutuhkan data anggaran dan realisasinya. Terdapat kriteria ekonomi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja organisasi sektor publik sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kriteria Ekonomi**

Rasio Ekonomi	Kriteria Ekonomi
100%- keatas	Sangat Ekonomis
90%- 100%	Ekonomis
80%- 90%	Cukup Ekonomis
60%- 80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Keppmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996

### **Efisiensi**

Menurut Halim (2008:164) rasio efisiensi digunakan untuk menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Terdapat kriteria efisiensi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja organisasi sektor publik sebagai berikut:



**Tabel 3**  
**Kriteria Efisiensi**

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100%- keatas	Tidak Efisien
90%- 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996

**Efektivitas**

Menurut Halim (2008:234) rasio efektivitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah atau organisasi sektor publik dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Terdapat kriteria efektivitas yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja organisasi sektor publik sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Kriteria Efektivitas**

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
100%- keatas	Sangat Efektif
90%- 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996

**HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Pembahasan Berdasarkan Pelayanan (PERMENPAN No.17 Tahun 2017)**

Berdasarkan hasil pengisian tiga form yang sudah disediakan oleh PERMENPAN dapat diketahui bahwa nilai dari masing-masing form tersebut adalah F-01 91% dimana form tersebut di isi oleh Kepala Puskesmas Trosobo-Taman, F-02 67,07% dimana form tersebut di isi oleh peneliti, sedangkan F-03 70,38% dimana form tersebut di isi oleh pengguna pelayanan kesehatan di Puskesmas Trosobo-Taman.

$$\text{Nilai Rata-Rata Form} = \left( \frac{91\%+67,07\%+70,38\%}{3} \right) = 76,15\%$$

**Penentuan Nilai Untuk Setiap Indikator**

**Tabel 1**  
**Nilai Untuk Setiap Indikator**

Aspek	Bobot Perindikator (X1)	Nilai ((F01+F02+F03)/3), (X2)	Nilai Perindikator (X1*X2)/100%
Aspek 1 (30%)	2,31%	76,15%	1,76%
Aspek 2 (18%)	2,57%	76,15%	1,96%
Aspek 3 (15%)	2,14%	76,15%	1,63%
Aspek 4 (15%)	3,00%	76,15%	2,28%
Aspek 5 (15%)	3,75%	76,15%	2,86%
Aspek 6 (7%)	7,00%	76,15%	5,33%

Sumber: Kuesioner (diolah,2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil perhitungan untuk nilai setiap indikator. Dari ke enam aspek tersebut yang mendapatkan nilai tertinggi adalah aspek ke enam yaitu aspek inovasi. Karena inovasi yang diterapkan di Puskesmas Trosobo telah dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pihak Puskesmas Trosobo juga bisa untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi yang dimiliki oleh Puskesmas Trosobo adalah "Permata Cinta Setia". Sedangkan yang mendapatkan nilai terendah adalah aspek ke tiga yaitu sarana prasarana pelayanan publik. Berdasarkan hasil

penelitian masyarakat pengguna pelayanan publik di Puskesmas Trosobo banyak sekali yang merasa kurang puas atas sarana prasarana yang sudah ada saat ini. Karena ada beberapa sarana prasarana yang menurut sebagian masyarakat itu penting tetapi tidak tersedia di Puskesmas Trosobo, contoh: Tidak adanya *front office* untuk layanan konsultasi tatap muka, tidak adanya *front office* untuk layanan pengaduan tatap muka, tidak adanya ruang khusus bagi ibu menyusui.

### Penentuan Nilai Setiap Aspek

**Tabel 2**  
**Nilai Setiap Aspek**

Aspek	Nilai Perindikator	Nilai Setiap Aspek
Aspek 1	1,76%	1,76%
Aspek 2	1,96%	1,96%
Aspek 3	1,63%	1,63%
Aspek 4	2,28%	2,28%
Aspek 5	2,86%	2,86%
Aspek 6	5,33%	5,33%

Sumber: Kuesioner (diolah,2019)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai setiap aspek sama dengan nilai per indikator. Karena pada saat melakukan perhitungan nilai per indikator dilakukan langsung pada setiap aspek bukan setiap kelompok. Sehingga tidak perlu lagi untuk menjumlahkan nilai setiap kelompok pada masing-masing aspek. Yang mendapatkan nilai aspek tertinggi adalah aspek ke enam yaitu aspek inovasi. Dan yang mendapatkan nilai aspek terendah adalah aspek ke tiga yaitu aspek sarana prasarana.

### Penentuan Nilai Indeks

**Tabel 3**  
**Nilai Indeks**

Aspek	Nilai Aspek (X1)	Bobot Aspek(X2)	Nilai Indeks (X1*X2)/100%
Aspek 1	1,76%	30%	0,53%
Aspek 2	1,96%	18%	0,35%
Aspek 3	1,63%	15%	0,25%
Aspek 4	2,28%	15%	0,34%
Aspek 5	2,86%	15%	0,43%
Aspek 6	5,33%	7%	0,37%
Jumlah			2,27%

Sumber: Kuesioner (diolah,2019)

Dari tabel 3 (tiga) dapat diketahui hasil perhitungan nilai indeks. Dan yang mendapatkan nilai indeks tertinggi adalah aspek ke satu yaitu kebijakan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Trosobo pada setiap unit pelayanan sudah memiliki standart pelayanan yang digunakan dalam proses pemberian pelayanan kesehatan. Selain itu pihak Puskesmas Trosobo juga melibatkan pengguna pelayanan dalam pengisian survey kepuasan masyarakat. Dan hasil dari survey tersebut digunakan Puskesmas Trosobo untuk mengevaluasi kinerjanya selama ini. Selain itu Puskesmas Trosobo juga terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan yang mendapatkan nilai aspek terendah adalah aspek ke tiga yaitu sarana prasarana.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka Puskesmas Trosobo dapat segera untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sehingga proses pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat juga merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan.

**Tabel 4**  
**Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**

Range Nilai	Kategori	Makna
0- 1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan catatan)
2,51-3,00	C-	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan catatan)
3,51-4,00	B-	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber: PP No.17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja

Berdasarkan tabel kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik diatas dapat diketahui bahwa nilai kinerja Puskesmas Trosobo yaitu cukup (dengan catatan). Karena range nilai yang diperoleh yaitu sebesar 2,27, yang termasuk dalam kategori C-. Range nilai ini diperoleh dari hasil menjumlahkan semua nilai indeks pada ke enam aspek yang ada.

**Pembahasan Berdasarkan Value For Money**

Puskesmas trosobo menerima anggaran dari pemerintah untuk program upaya kesehatan masyarakat yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: (1) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Trosobo (2) Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Trosobo (3) Pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPK BLUD Puskesmas Trosobo.

**Ekonomi**

Pada penelitian ini pengukuran ekonomi dilakukan dengan perhitungan pengurangan pagu anggaran dengan realisasi anggaran, agar dapat diketahui apakah terdapat penghematan pada masing-masing program di Puskesmas Trosobo. Tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan juga dapat dilihat dari perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya. Ekonomis adalah suatu tindakan atau perilaku dimana kita dapat memperoleh input berupa barang atau jasa yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga yang sekecil mungkin. Dari pengertian tersebut dapat diketahui ada dua unsur yang sangat penting yaitusumber daya (biaya) dan input (barang dan jasa).

**Tabel 5**  
**Pengukuran Ekonomi Pada Puskesmas Trosobo Periode 2017**

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penghematan	Capaian
1	Penyediaan Biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Trosobo.	Rp. 761.799.000	Rp. 740.916.711	Rp. 20.882.289	97,26%
2	Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Trosobo.	Rp. 368.006.900	Rp. 311.267.000	Rp. 56.739.900	84,58%
3	Pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPK BLUD Puskesmas Trosobo.	Rp.1.543.128.418	Rp. 1.412.251.934	Rp. 130.876.484	91,52%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Sidoarjo (diolah,2019)

Dari data pada tabel 5 (lima) dapat diketahui bahwa seluruh program atau kegiatan pada Puskesmas Trosobo telah berjalan dengan ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari penghematan pada masing-masing program yaitu pada pembiayaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas Trosobo berhasil melakukan penghematan sebesar Rp. 20.882.289, pada pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Trosobo berhasil melakukan penghematan sebesar Rp. 56.739.900, dan pada pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPK BLUD Puskesmas Trosobo berhasil melakukan penghematan sebesar Rp. 130.876.484. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penghematan terbesar terletak pada program pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPK BLUD Puskesmas Trosobo.

**Tabel 6**  
**Kriteria Ekonomi**

Rasio Ekonomi	Kriteria Ekonomi
100%- keatas	Sangat Ekonomis
90%- 100%	Ekonomis
80%- 90%	Cukup Ekonomis
60%- 80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996

Selain itu, dari tabel kriteria ekonomi diatas dapat diketahui pula tingkat capaian yang di peroleh Puskesmas Trosobo. Pada program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Trosobo dapat memperoleh capaian sebesar 97,26% yang termasuk dalam kriteria ekonomis, sedangkan pada program pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Trosobo sebesar 84,58% yang masuk dalam kriteria cukup ekonomis, dan untuk program pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPK BLUD Puskesmas Trosobo sebesar 91,52% yang masuk dalam kriteria ekonomis. Tingkat capaian tertinggi pada Puskesmas Trosobo terletak pada program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Trosobo.

### Efisiensi

Penilaian kinerja berdasarkan aspek efisiensi pada penelitian ini di peroleh dari hasil perhitungan realisasi anggaran dibagi dengan total realisasi anggaran. Sebagaimana hasil pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7**  
**Pengukuran Efisiensi Pada Puskesmas Trosobo Periode 2017**

NO	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran (X1)	Capaian ((X1:X2)*100%)
1	Penyediaan Biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Trosobo.	Rp. 740.916.711	30,06%
2	Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Trosobo.	Rp. 311.267.000	12,63%
3	Pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPK BLUD Puskesmas Trosobo.	Rp. 1.412.251.934	57,31%
Total (X2)		Rp. 2.464.435.645	

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Sidoarjo (diolah,2019)

Dari hasil perhitungan pada tabel 7 dapat diketahui bahwa semua program pada Puskesmas Trosobo sudah berjalan sangat efisiensi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pencapaian pada ketiga program tersebut. Dimana pada program Penyediaan Biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Trosobo memiliki tingkat pencapaian 30,06%, pada program Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Trosobo memiliki tingkat capaian sebesar 12,63%, dan pada program Pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPK BLUD Puskesmas Trosobo mendapatkan capaian sebesar 57,31%.

Dan ketiga program tersebut masuk dalam kriteria sangat efisien berdasarkan tabel 8 dibawah ini:

**Tabel 8**  
**Kriteria Efisiensi**

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% - keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996

Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya dan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan dapat mencapai target yang telah ditentukan hanya dengan menggunakan 30,06% dari total anggaran yang harus dikeluarkan. Sedangkan pada program pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Trosobo dapat mencapai target yang telah ditentukan hanya dengan menggunakan 12,63% dari total anggaran yang harus dikeluarkan. Dan untuk program pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPK BLUD Puskesmas Trosobo hanya perlu menggunakan 57,31% dari total anggaran yang harus dikeluarkan untuk mencapai target yang telah ditentukan.

**Efektivitas**

Pada penelitian ini penilaian kinerja berdasarkan tingkat efektivitas akan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.2.464.435.645}}{\text{Rp.2.672.934.318}} \times 100 = 92,20\%$$

Angka tersebut berasal dari total realisasi anggaran dibagi dengan total pagu anggaran pada tahun 2017 di Puskesmas Trosobo. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh program pada tahun 2017 berjalan secara efektif. Karena tingkat capaian efektivitas pada tahun 2017 sebesar 92,20% yang masuk dalam kriteria efektif sesuai dengan tabel dibawah ini:

**Tabel 9**  
**Kriteria Efektivitas**

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
100% - keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996

Dari tabel kriteria diatas dapat diketahui bahwa ketiga program Puskesmas Trosobo yang telah dilaksanakan memberikan dampak dan pengaruh langsung kepada masyarakat sangat tinggi. Karena target yang telah ditentukan oleh Puskesmas Trosobo telah tercapai sesuai dengan keinginannya.

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Menurut hasil analisis dan pembahasan pada penelitian “ Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Berdasarkan PERMENPAN No. 17 Tahun 2017 Dan *Value For Money*”

dimana studi kasus pada penelitian ini di Puskesmas Trosobo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil penilaian kinerja publik berdasarkan PERMENPAN No.17 Tahun 2017 menunjukkan bahwa kinerja Puskesmas Trosobo adalah cukup (dengan catatan). Berdasarkan tabel kategori unit penyelenggara pelayanan publik yang telah disediakan oleh PERMENPAN maka kinerja Puskesmas Trosobo masuk dalam kategori cukup (dengan catatan) dengan nilai 2,49 (2) Hasil penilaian kinerja berdasarkan *Value for Money*. Ditinjau dari tingkat ekonomi, kinerja dari Puskesmas Trosobo sudah masuk dalam kriteria ekonomis. Karena nilai pencapaian dari semua program pada Puskesmas Trosobo lebih dari 80%. Ditinjau dari tingkat efisiensi ketiga program yang dilaksanakan oleh Puskesmas Trosobo juga sudah masuk dalam kriteria efisien. Karena nilai capaian dari ketiga program tersebut adalah kurang dari 60%. Ditinjau dari tingkat efektivitas kinerja pelayanan Puskesmas Trosobo juga sudah masuk dalam kriteria efektif dengan nilai capaian sebesar 92,20%.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: (1) Adanya keterbatasan peneliti dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini, antara lain: Laporan kinerja Puskesmas Trosobo, rekap data survei kepuasan masyarakat, daftar hadir penyusunan standart pelayanan, rincian program-program yang sedang dilaksanakan oleh Puskesmas Trosobo (2) Adanya keterbatasan peneliti dalam pengisian Form 3 (tiga) yang telah disediakan oleh PERMENPAN yaitu dimana ada beberapa masyarakat yang mengisi form tersebut kurang mengerti maksud dari pertanyaan yang ada pada form 3 (tiga) (3) Adanya keterbatasan peneliti dalam hal waktu penelitian.

### **Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Puskesmas Trosobo maupun bagi Peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini yaitu: (1) Puskesmas Trosobo diharapkan dapat mampu untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin agar tercapainya tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi selain itu pemberian pelayanan pada aspek konsultasi dan pengaduan pada Puskesmas Trosobo bisa ditingkatkan lagi dengan cara penyediaan petugas khusus untuk melayani pengaduan masyarakat atau dengan cara penyediaan pengisian form saran bagi masyarakat setelah menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Trosobo agar Puskesmas Trosobo juga bisa meningkatkan tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat setiap harinya (2) Bagi peneliti selanjutnya pada penilaian kinerja berdasarkan *Value for Money* bisa memperoleh rincian kegiatan dan anggaran yang lebih mendetail lagi selain itu peneliti juga diharapkan mau untuk menggunakan konsep yang lain untuk melakukan penilaian kinerja pada Puskesmas Trosobo sehingga kinerja pada Puskesmas Trosobo dapat diketahui dari berbagai konsep penilaian kinerja yang lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Eka, R.A. 2018. Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sidoserma Surabaya. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Halim, A. 2008. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Unit Penerbitan dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.
- Madelia, M. 2015. Penilaian Kinerja Organisasi Pemerintah: *Value for Money*. Tesis. Program S2 Akuntansi Universitas Jambi. Jambi.
- Mahsun, M. Dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*. 15 Juni 2017. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Suwandi, M. M. 2016. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Dalam Perspektif *Value for Money*. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.